

DOI: <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v3i2.929>

## Penguatan Literasi Digital Bagi Jurnalis Kepulauan Riau Guna Meminimalisir Gangguan Informasi Melalui Pelatihan Cek Fakta

Syahrul Rahmat<sup>1\*</sup>, Sukma Adi Perdana<sup>2</sup>, Siti Aqidatul Munawaroh<sup>3</sup><sup>1, 2, 3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Bintan, Kepulauan Riau, 29122, Indonesia\* [syahrul28@gmail.com](mailto:syahrul28@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak selamanya memberikan dampak positif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah maraknya fenomena gangguan informasi (*information disorder*). Jurnalis sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi yang kredibel perlu mengikuti dan meningkatkan kapasitas terkait literasi digital. Maraknya fenomena hoaks yang berkembang di media sosial membutuhkan jurnalis yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan menverifikasi. Pengabdian ini melibatkan jurnalis muda di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pada dasarnya jurnalis-jurnalis di Kepulauan Riau sudah memahami mis-disinformasi. Akan tetapi tetap perlu dilakukan penguatan terkait perkembangan literasi digital, sebab seiring berkembangnya teknologi, hoaks juga semakin banyak dan berkembang. Setelah pelatihan, para jurnalis mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang perkembangan literasi digital dan *tools* yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan fakta.

**Kata kunci:** Cek Fakta, Gangguan Informasi, Jurnalis, Literasi Digital.

### Abstract

*The increasing of information and communication technology does not always have a positive impact. One of the negative impacts is the rise of the phenomenon of information disorder. Journalists as the front line in the dissemination of credible information need to follow and increase capacity related to digital literacy. The rise of the hoax phenomenon that develops on social media requires journalists who have the ability to recognize and verify. This service involves young journalists in Kepulauan Riau Province, especially Tanjungpinang City. In its implementation, this service uses a Participatory Action Research (PAR) approach. Basically, journalists in Kepulauan Riau already understand mis-disinformation. However, it is still necessary to strengthen related to the development of digital literacy, because as technology develops, hoaxes are also increasing and growing. After the training, journalists gain new understandings about the development of digital literacy and the tools used in conducting fact checks.*

**Keywords:** Digital Literacy, Fact Checking, Information Disorder, Journalist.

## Pendahuluan

Peralihan media informasi dari cetak ke digital membawa begitu banyak perubahan dari berbagai aspek. Perubahan tersebut membawa banyak dampak, baik itu dampak negatif maupun positif. Ibarat dua mata pedang, tidak selamanya perubahan itu membawa hal-hal yang baik, seperti mudahnya akses informasi secara cepat. Di lain sisi, dampak buruk dari perubahan itu juga berpotensi membuat kekacauan dalam hal penyebarluasan informasi. Salah satunya berkaitan dengan potensi terjadinya ketidaktepatan informasi lantaran sejumlah media massa berupaya untuk memberitakan sesuatu secara cepat sehingga cenderung terdapat kekeliruan.

Literasi digital secara sederhana dapat dimaknai sebagai kecakapan dalam mengelola informasi dalam bentuk digital atau piranti lunak. Hal ini terjadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman dahulu informasi hanya dapat diakses melalui buku, surat kabar, majalah, selebaran dan berbagai media konvensional lainnya, maka di masa sekarang informasi dengan mudah dapat diakses melalui internet. Penggunaan internet yang masif di kalangan masyarakat membuat informasi tersebar sangat cepat. Peristiwa yang terjadi sekarang akan dapat diakses oleh orang di belahan dunia lain dalam tempo waktu sepersekian menit, bahkan detik.

Informasi di era digital bisa dibuat oleh siapa saja dan diakses oleh siapa saja pada sejumlah platform media sosial. Fenomena ini tentu berdampak pada kualitas informasi itu sendiri, sehingganya banyak terjadi mis maupun disinformasi di media sosial. Hal inilah yang akan menjadi tantangan bagi para jurnalis sebagai orang yang bekerja secara profesional dalam penyebarluasan informasi yang akurat dan terpercaya. Informasi yang disebarluaskan oleh jurnalis melalui media massa harusnya informasi yang kredibel secara faktual. Sementara informasi yang disebarluaskan oleh masyarakat kerap kali harus diuji untuk memastikan informasi tersebut benar.

Perkembangan dunia digital tidak serta merta membuat kerja jurnalis menjadi lebih mudah. Dalam hal publikasi dan penjangkaran isu barangkali akan semakin mudah, akan tetapi tidak dengan kualitas pemberitaan. Kemajuan teknologi di bidang informasi beriringan dengan berkembangnya informasi yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal ini, jurnalis bertugas mengkonter informasi-informasi yang salah agar tidak menyesatkan masyarakat.

Kasus terbaru terkait disinformasi adalah unggahan foto beserta keterangan oleh Menteri Sekretariat Negara, Tjahyo Kumolo di platform media sosial twitter. Dalam foto yang ia unggah, Tjahyo menulis "Jalan tol terkeren di Indonesia, Cismudawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan)". Informasi tersebut tidak sepenuhnya benar, setelah telusuri, nyatanya foto yang diunggah tersebut merupakan jalan yang berada di Turki (detikcom, n.d.). Posisi Tjahyo sebagai pejabat kelas nasional tentu akan menjadi perhatian banyak kalangan, terutama media massa. Sebagai orang yang penting, informasi yang disampaikan memiliki nilai berita. Apabila jurnalis tidak memiliki kapasitas literasi digital yang baik, maka unggahan Tjahyo Kumolo itu akan diolah menjadi berita dan pastinya akan menyesatkan masyarakat. Hal yang terjadi pada Tjahyo Kumolo bukan kasus pertama di Indonesia. Sebelumnya cukup banyak kasus serupa yang bahkan diberitakan oleh media massa, seperti hoaks penganiayaan oleh Ratna Sarumpaet pada 2018. Kasus Ratna diberitakan oleh hampir seluruh media nasional, mulai dari televisi, daring maupun cetak (*Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet - Nasional Tempo.Co*, n.d.). Ibarat kata, bahkan jurnalis pun dapat terjebak dengan mis dan disinformasi.

Kepulauan juga memiliki tidak sedikit jurnalis dari berbagai media massa, baik dari media cetak, daring maupun digital. Dari ratusan media yang ada di Kepulauan Riau, setidaknya terdapat sebanyak 196 media massa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Dari 196 media tersebut, terdapat sebanyak 556 wartawan yang sudah tersertifikasi, mulai dari wartawan muda, madya dan utama, sertifikasi itu didapatkan dari sejumlah lembaga seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta lembaga lainnya (*Dewan Pers*, n.d.). Dari ratusan jumlah wartawan tersebut, tidak banyak yang terafiliasi ke asosiasi profesi. Anggota PWI Kepulauan Riau tercatat sebanyak 160 orang (*PWI - Persatuan Wartawan Indonesia*, n.d.). Sementara itu sebanyak 48 orang terafiliasi ke AJI, yang terdiri dari AJI Kota Batam dan Tanjungpinang (*Aliansi Jurnalis Independen*, n.d.).

Sebanyak 196 media massa terverifikasi dan 556 wartawan tersertifikasi diduga hanya sebagian dari total jumlah media dan jurnalis yang ada. Fakta di lapangan, masih banyak media yang belum terverifikasi serta jurnalis yang belum tersertifikasi. Di Indonesia, setidaknya terdapat sebanyak 43.000 media massa yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagian dari jumlah tersebut adalah media-media yang ada di Kepulauan Riau (*Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, n.d.). Sekalipun sudah memiliki sertifikasi, semua jurnalis tersebut perlu diberikan penguatan terkait literasi digital, terutama jurnalis muda dan belum tersertifikasi oleh lembaga berwenang. Penguatan ini nantinya akan diarahkan pada pengecekan fakta menggunakan *tools* yang tersedia di google maupun aplikasi lainnya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut peningkatan kapasitas pengguna, baik itu produsen maupun konsumen informasi. Maraknya terjadi dis dan misinformasi dalam memproduksi berita oleh sejumlah jurnalis menuntut perlunya upaya peningkatan kapasitas di bidang tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud berkaitan dengan literasi digital, tentang bagaimana melakukan klarifikasi dan verifikasi informasi yang tersebar di dunia maya sebelum diolah menjadi produk jurnalistik.

Penguatan literasi digital bagi jurnalis muda di Kepulauan Riau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas di bidang verifikasi informasi dengan metode cek fakta. Tidak semua *statement* orang penting dapat langsung dijadikan berita. Perkembangan teknologi digital memungkinkan setiap jurnalis untuk melakukan verifikasi atau penelusuran terhadap validitas informasi sebelum disebarluaskan dalam bentuk produk jurnalistik.

Penguatan literasi digital bagi jurnalis muda di Kepulauan Riau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas di bidang verifikasi informasi dengan metode cek fakta. Tidak semua *statement* orang penting dapat langsung dijadikan berita. Perkembangan teknologi digital memungkinkan setiap jurnalis untuk melakukan verifikasi atau penelusuran terhadap validitas informasi sebelum disebarluaskan dalam bentuk produk jurnalistik.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada artikel pengabdian yang fokus pada pelatihan cek fakta terhadap jurnalis. Hanya saja, terdapat sejumlah tulisan yang berkaitan dengan hal tersebut. Tulisan-tulisan tersebut tidak hanya ditulis oleh akademisi, akan tetapi juga oleh para praktisi yang bergerak di bidang cek fakta.

Sebuah kajian yang kemudian diterbitkan dalam bentuk bunga rampai terkait jurnalisisme dan misinformasi pernah dilakukan oleh Julie Posetti dkk, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia pada 2019. Buku berjudul *Jurnalisisme, "Berita Palsu", & Disinformasi: Konteks Indonesia* itu diterbitkan atas kerjasama UGM dengan UNESCO (*Jurnalisisme, "berita Palsu", & Disinformasi: Buku Pegangan Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Jurnalisisme - UNESCO Digital Library*, 2019). Buku tersebut berisi tujuh artikel dari empat orang penulis itu membahas tentang pemberitaan serta misinformasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, Lintang Muliawanti pada tahun 2018 menulis sebuah artikel berjudul *Jurnalisisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisisme dan Profesionalitas Jurnalisisme Online*. Artikel yang terbit pada Jurnal Lentera itu membahas tentang profesionalitas seorang jurnalis dalam menyajikan informasi sebagai sebuah produk jurnalistik. Menurutnya, langkah praverifikasi kemudian beralih menjadi pascaverifikasi dalam memproduksi dan penyajian sebuah berita (Muliawanti, 2018).

*Jurnalis dan Jurnalisisme dalam Fenomena Kontemporer* adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Pandan Yudhapramesti pada tahun 2015. Dalam artikel yang dipublikasikan di Jurnal Komunikasi itu membahas dunia jurnalistik yang terancam dengan perkembangan teknologi digital. Menurut Yudhapramesti, kemampuan untuk menyesuaikan diri oleh jurnalis maupun media massa adalah salah satu jawaban untuk tetap eksis (Yudhapramesti, 2015). Pada tahun 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerbitkan sebuah panduan untuk memeriksa misinformasi terkait Covid-19 bagi para jurnalis dan pemeriksa fakta dengan judul *Periksa Fakta Melawan Infodemi*. Buku yang ditulis oleh Afwan Purwanto, dkk, itu membahas tentang misinformasi yang berkembang selama Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, pada buku yang diterbitkan atas kerjasama dengan Google News Initiative tersebut juga diberikan panduan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari sebuah informasi yang telah menyebar di masyarakat (*Periksa Fakta Melawan Infodemi*, n.d.).

Pada tahun 2022, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerbitkan modul literasi digital untuk perguruan tinggi. Buku berjudul *Modul Literasi Digital Untuk Perguruan Tinggi* itu ditulis oleh sejumlah *fact checker* dari kalangan jurnalis dan akademisi perguruan tinggi di Indonesia. Buku tersebut berisi sejumlah artikel tentang literasi digital dan fenomena *information disorder* di Indonesia. Di dalamnya dibahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berita bohong atau hoaks serta arti penting keterlibatan akademisi dalam mencegah beredarnya hoaks di masyarakat (Mardjianto et al., 2022). Dari beberapa tulisan di atas, artikel ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, mulai dari subjek maupun objek pengabdian. Oleh karenanya, penguatan literasi digital terhadap jurnalis yang ada di Kepulauan Riau melalui pelatihan cek fakta menjadi pengabdian yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya.

### Metode

Pengabdian ini menggunakan Metode *Participatory Action Research* (PAR), yang merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif diantara warga masyarakat dalam suatu komunitas atas bawah yang tujuannya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif untuk melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Secara sederhana, PAR berangkat dari penelitian yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam sebuah persoalan di masyarakat. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan upaya pengkajian terhadap tindakan yang tengah dilakukan guna melakukan perbaikan dan perubahan (Afandi et al., 2016). Partisipasi antara pengabdian bersama stakeholder dibutuhkan untuk mengenali persoalan berdasarkan pengalaman mereka, sehingga dapat bergerak untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan pendekatan PAR pada dasarnya dimulai dari tindakan mikro dengan konteks yang makro (Afandi, 2020). Penyelesaian persoalan yang berlaku global atau makro hendaknya dimulai dari masalah-masalah kecil yang berkaitan dengan konteks makro. Persoalan besar biasanya dibangun oleh hal-hal kecil. Dalam penerapannya, pengabdian masyarakat hendaknya dimulai dengan mengidentifikasi persoalan-persoalan mendasar untuk menyelesaikan masalah yang besar. Karenanya, pelibatan masyarakat menjadi begitu penting untuk mengentaskan masalah dalam konteks makro.

Peneliti atau pengabdian dalam kegiatan PAR tidak memisahkan diri dari keadaan masyarakat yang sudah diteliti, namun meleburkan dalam bekerjasama dengan warga dalam hal ini adalah sejumlah wartawan yang ada di Kepulauan Riau dalam melakukan PAR. PAR membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang ada, karena PAR tidak berposisi “bebas nilai” dan tidak memihak kepada tuntutan dari ilmu pengetahuan yang menjadi syarat dari obyektivitas. PAR diharapkan berpihak pada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban dari suatu kegiatan. PAR juga tidak berhenti hanya karena publikasi hasil riset (laporan) dan rekomendasi untuk riset selanjutnya, akan tetapi PAR berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memahami situasi yang lebih baik.

Salah satu prinsip kerja pengabdian yang memiliki orientasi terhadap perubahan sosial adalah dengan dilakukannya pengembangan riset secara bersama. PAR akan dilakukan oleh fasilitator dengan komunitas, dalam hal ini adalah wartawan muda di Kepulauan Riau dengan fasilitator dari akademisi maupun *trainer* cek fakta. Dalam proses ini terdapat kolaborasi antara dua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan literasi digital dengan segala resiko yang ada di depannya.

Bentuk kolaborasi tersebut dimulai dengan dilakukannya penyamaan persepsi terkait mis dan mis informasi di media massa maupun media sosial. Tidak hanya itu, kepada para praktisi yang merupakan jurnalis muda juga diberikan pemahaman terkait perkembangan literasi yang tidak lagi berkutat di ranah konvensional dalam skala cetak atau fisik, akan tetapi sudah masuk pada ranah digital yang penyebarluasannya jauh lebih cepat. Lebih lanjut baru dilakukan pelatihan untuk melakukan verifikasi informasi berbasis digital dengan metode cek fakta.

Pengabdian ini dilakukan di *meeting room* Hotel Pelangi, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada Sabtu, 16 Juni 2022. Persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang yang sudah dimulai beberapa bulan sebelum pengabdian dilakukan. Pelibatan AJI Tanjungpinang berkaitan dengan posisi AJI sebagai salah satu organisasi profesi yang mewadahi jurnalis yang ada di Kota Tanjungpinang, selain itu juga berkaitan dengan *track record* AJI yang pernah melakukan hal serupa pada tahun 2019. Koordinasi dilakukan untuk mendata jumlah jurnalis yang ada di Kota Tanjungpinang, khususnya yang tergabung dalam organisasi AJI serta keberadaan Pers Mahasiswa di daerah tersebut.

Setelah pendataan jumlah calon peserta, dilakukan persiapan berupa koordinasi dengan AJI Indonesia (pusat) terkait penentuan *trainer* yang akan memberikan pelatihan. Hal ini dilakukan sebab tidak semua orang dapat menjadi trainer dalam kegiatan ini. AJI adalah salah satu organisasi yang sudah melatih trainer cek fakta. Trainer-trainer dalam pelatihan ini adalah trainer kompeten yang berasal dari kalangan praktisi media dan akademisi.

Pada tahap pelaksanaan, pelatihan dilakukan dengan menghadirkan dua orang trainer tersertifikasi Google News Initiative dan AJI. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari jurnalis media massa dan jurnalis kampus atau pers mahasiswa. Pada pelatihan juga diberikan sejumlah pertanyaan untuk melihat sejauh mana pemahaman jurnalis terkait *information disorder*.

Pengabdian ini melibatkan jurnalis yang tergabung dalam keanggotaan AJI Kota Tanjungpinang. Selain jurnalis yang sehari-hari bekerja di media massa, kegiatan ini juga melibatkan jurnalis mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pelibatan pers mahasiswa dinilai penting mengingat keberadaan mereka juga sangat penting dalam penyebaran informasi. Hanya saja skalanya lebih kecil dari jurnalis pada umumnya yang hanya berada dalam ruang lingkup kampus.

## Hasil dan Pembahasan

### Literasi Digital

Literasi digital pada dasarnya adalah kegiatan memahami informasi dengan berbagai aspek yang berkaitan dengannya melalui piranti lunak (*software*). Perkembangan teknologi informasi tidak lagi menyediakan informasi dalam versi cetak berupa buku, majalah, surat kabar, buletin dan lain sebagainya. Pada era sekarang, informasi sudah tersebar luas di secara digital baik daring maupun luring. Ketersediaan informasi secara daring melimpah ruah yang dapat diakses oleh siapapun menggunakan layanan internet.

Pada buku *Digital Literacy* yang ditulis Paul Gilster pada 1997 disebutkan literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan dalam memahami serta menggunakan informasi dengan berbagai bentuk yang berasal dari sumber yang lebih luas dan diakses menggunakan computer (Gilster, 1997). Pendapat Gilster tentunya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada pada tahun 2021. Di masa sekarang, informasi tidak hanya tersimpan di komputer dalam bentuk *offline*, bahkan sudah tersebar secara luas dan dapat diakses melalui gawai seperti *smartphone*.

Lebih luas, Unesco mendefinisikan literasi digital pada cakupan yang lebih luas dan kompleks. Literasi bukan hanya segala sesuatu yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Lebih lanjut dapat dimaknai sebagai proses memahami yang dilanjutkan dengan menafsirkan, menciptakan, kemudian mengkomunikasikan, memperhitungkan hingga menggunakan bahan cetak beserta tulis yang berkaitan dengan konteks tertentu (UNESCO, 2004). Pengertian ini agaknya dapat menjadi tolak ukur bahwasanya literasi tidak hanya dipahami pada aktivitas membaca dan menulis saja.

Martin dalam Koltay (2011) menyebutkan literasi digital merupakan sikap, kesadaran, serta kemampuan individu guna mempergunakan alat dan fasilitas digital dengan tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi menganalisis, dan menyintesis sumber daya digital.

Di dalamnya dibangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, hingga berkomunikasi dengan orang lain. Lebih lanjut dalam konteks situasi kehidupan tertentu, guna memungkinkan tindakan sosial konstruktif; dan merenungkan proses yang dilalui (Koltay, 2011).

Difusi media digital dalam bidang teknologi informasi serta telekomunikasi belakangan masuk ke dalam ranah penelitian new media atau media baru. Dalam kajian new media disebutkan bahwa komunikasi yang awalnya dalam media tradisional (dalam hal ini penulis lebih sepekat dengan media konvensional) telah mulai bergeser seiring perkembangan teknologi. Hal itu berdampak pada terjadinya transformasi yang cukup substantif dalam komunikasi yang menggunakan media. Perubahan ini terlihat sangat jelas dengan semakin berkembangnya media-media berbasis digital (Restianty, 2018).

Munculnya informasi yang instan tidak terlepas dari tidak terlepas dari adanya layanan internet. Informasi yang pada awalnya didapat dari media konvensional berupa cetak ataupun elektronik, kemudian berkembang dan dapat diakses dalam media digital. Sejumlah riset tentang new media mulai ramai bermunculan, beberapa hal yang menjadi sasaran penelitian ini diantaranya adalah globalisasi, konvergensi media, serta internet sebagai media alternatif untuk menyajikan informasi tanpa kendala teknis saat penyiaran (Littlejohn & Foss, 2009).

### Gangguan Informasi (*Information Disorder*)

Gangguan informasi (*information disorder*) oleh Wardle & Derakhshan (2017) didefinisikan sebagai penyebaran informasi palsu, hal tersebut dilakukan dengan atau tanpa maksud untuk merugikan (Mardjianto et al., 2022). Terlepas dari tujuannya, pada dasarnya informasi palsu yang beredar di masyarakat disebarkan dengan sengaja dan tidak sengaja. Berbagai motivasi terkait penyebarluasan tersebut lebih lanjut akan terbagi pada beberapa pola berdasarkan dengan konten maupun motivasi si penyebar informasi.

Wardle dan Derakhshan (2017) berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap elemen-elemen pada gangguan informasi. Di dalamnya meliputi pelaku, pesan dan penerima (Wardle & Derakhshan, 2017). Pelaku atau agen dalam hal ini dapat dilihat dari sudut pandang motivasi, organisasi atau kelompok dan lain sebagainya. Selanjutnya pesan yang disampaikan juga harus dilihat lebih teliti dengan memeriksa akurasi, keabsahan hingga target penerima pesan. Penerima pesan adalah hanl yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, salah satunya apa yang dilakukan seorang penerima pesan setelah mendapat informasi.



Gambar 1. Bagan elemen *information disorder*  
(Sumber: Wardle & Derakhshan, 2017)

Lebih lanjut, terdapat tiga kategori gangguan informasi, yaitu misinformasi, disinformasi dan malinformasi (Rahmat, 2022). Ketiga hal ini memiliki kesamaan, yakni bermuatan informasi palsu. Hanya saja, dari segi motivasi, ketiga hal ini memiliki perbedaan. Misinformasi adalah penyebarluasan informasi yang salah oleh orang-orang yang mempercayai bahwa informasi tersebut benar. Dalam hal ini, komunikator

tidak mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Penyebaran informasi ini juga berkaitan dengan alasan sosio-psikologi komunikator.

Disinformasi adalah penyebarluasan informasi yang salah dan penyebar informasi mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Artinya, komunikator menyadari informasi yang ia miliki salah, akan tetapi yang bersangkutan tetap penyebarluaskan informasi tersebut, dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Motivasi penyebarluasan informasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, tergantung pada kepentingan dan keuntungan apa yang akan didapatkan setelahnya. Selain itu, penyebarluasan informasi ini juga berdasarkan motivasi dalam hal politik atau pun untuk memprovokasi.

Malinformasi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan informasi. Dalam hal ini, belum tentu informasi yang digunakan itu salah, bisa jadi informasi yang benar. Hanya saja, hal tersebut dapat menjadi gangguan ketika salah dalam menggunakan atau mendistribusikan. Gangguan yang dimaksud dapat berupa provokasi kerusakan, kerap terjadi pada informasi yang mestinya ada pada ranah pribadi tapi kemudian disampaikan di ruang publik.

### **Pemeriksaan Fakta Bagi Jurnalis Guna Mencegah Kekacauan Informasi**

Pemeriksaan fakta merupakan upaya untuk memeriksa fakta dari sebuah informasi. Langkah dalam melakukan pemeriksaan ini kemudian dikenal dengan sebutan verifikasi. Hal ini dilakukan guna mengetahui fakta di balik sebuah informasi. Kata kunci pada bagian ini adalah fakta, dimana fakta berarti sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam hal ini yang menjadi titik perhatiannya adalah apakah nilai yang ada di dalam sebuah informasi berupa fakta atau hanya dugaan atau persepsi.

Kerja pemeriksaan fakta tidak terlepas dari nilai-nilai jurnalisisme. Dalam memproduksi sebuah artikel sebagai produk jurnalistik, fakta adalah hal yang paling penting. Setiap produk jurnalistik harus berlandaskan fakta. Untuk itu, jurnalis perlu melakukan verifikasi untuk memastikan fakta dari sebuah peristiwa, agar tidak terjadi kesimpang siuran dari produk yang dihasilkan.

Pemeriksaan fakta pada awalnya muncul dalam bentuk *multitracking journalism* atau jurnalisisme contong. Hal ini dilakukan untuk membahas pemberitaan yang kontroversial menggunakan laporan investigasi (Amazeen, 2020). Investigasi atau liputan mendalam merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh jurnalis untuk mendapatkan informasi yang valid. Proses yang dilalui cukup panjang dan detil. Dibutuhkan informasi yang lebih komprehensif, sumber berimbang dan terutama informasi yang berangkat dari fakta.

Penguatan literasi digital bagi jurnalis di Kepulauan Riau dilakukan dengan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan mis dan disinformasi. Pada tahapan ini peserta akan diperkenalkan jenis dan bagaimana sebuah informasi yang salah diproduksi lalu disebarluaskan. Lebih lanjut, peserta akan diajarkan bagaimana menverifikasi informasi berbasis digital dengan metode cek fakta.

Cek fakta atau pemeriksaan fakta adalah sebuah proses verifikasi yang lazim digunakan dalam dunia jurnalisisme. Pemeriksaan fakta sudah dimulai sejak awal abad ke-20, yakni pada tahun 1920. Pada masa tersebut mulanya dilakukan oleh Majalah Time yang memperkerjakan tenaga khusus untuk memeriksa ketepatan informasi dari wartawan di lapangan (Mardjianto et al., 2022). Pada perkembangannya, pemeriksaan fakta semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada masa dahulu dilakukn secara manual dengan memeriksa berbagai informasi tertulis, maka pada masa sekarang sudah memanfaatkan *platform* digital.

Semua persoalan terkait mis dan informasi pada dasarnya dapat diminimalisir dengan meningkatkan kapasitas jurnalis selaku corong informasi yang bekerja dengan kode etik. Prinsipnya, seorang jurnalis hanya akan memberitakan peristiwa yang sifatnya faktual dan kebenarannya dapat dikonfirmasi. Perkembangan media informasi dari konvensional menjadi digital menuntut perlu dilakukannya penguatan kapasitas terhadap para jurnalis tersebut.

Merujuk pada data Dewan Pers, hingga saat ini terdapat 196 media yang sudah terverifikasi. Termasuk jumlah yang besar untuk wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Ketujuh

kabupaten.kota itu adalah Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

Jumlah di atas adalah jumlah media yang sudah terverifikasi, artinya masih ada media-media lain yang masih belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, bisa saja sejumlah media masih dalam proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual. Selain itu barangkali memang ada media yang tidak lolos verifikasi atau memang belum mengajukan. Artinya, Kepri dapat dikatakan memiliki lebih dari 200, 300 atau bahkan 400 media.

Kepri merupakan salah satu provinsi terdepan yang berada di garis perbatasan. Wilayah utara provinsi ini berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Sisi utara Batam dan Bintan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Anambas dan Natuna berbatasan dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan, dimana pada kawasan tersebut akan berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja.

Selain itu, Kota Batam merupakan salah satu kota industri yang cukup sibuk di Indonesia. Selain karena ia berada di perbatasan, pada Kawasan ini juga banyak berkembang isu-isu yang cukup penting. Karenanya, keberadaan media di kawasan menjadi cukup penting sebagai daerah vital, tidak hanya bagi Provinsi Kepri, tapi juga untuk Indonesia.

Berangkat dari jumlah media yang ada di Provinsi Kepri, keberadaan jurnalis tentu juga akan sangat banyak. Dewan Pers mencatat di provinsi ini terdapat 556 jurnalis yang sudah tersertifikasi kompeten. Sertifikasi tersebut berasal dari beragam kategori, mulai dari wartawan muda, media dan utama. Sertifikasi tersebut berasal dari sejumlah asosiasi, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Artinya setidaknya Kepri sudah memiliki jurnalis-jurnalis kompeten dalam kerja jurnalistik.

Sebagaimana media, tentu saja masih banyak jurnalis yang belum tersertifikasi kompeten. Terdapat beberapa alasan untuk ini, salah satunya adalah uji sertifikasi yang tidak dapat dilakukan setiap saat. Selanjutnya juga berkaitan dengan keinginan dari pribadi jurnalis itu sendiri, apakah ingin mengikuti sertifikasi kompetensi atau tidak. Selain itu juga ada sudah mengikuti ujian akan tetapi belum lulus.

Angka jurnalis yang belum tersertifikasi kompeten diprediksi bisa tiga hingga empat kali lipat jumlah wartawan yang sudah tersertifikasi. Sebab, faktanya selalu terjadi regenerasi jurnalis pada setiap media. Tidak hanya itu, terkadang perbandingan jumlah wartawan tersertifikasi pada satu media bisa 1 banding 3 atau bahkan 1 banding 4.

Dari sekian banyak wartawan yang ada, sebagian diantaranya sudah tergabung ke dalam organisasi profesi. Anggota PWI Kepulauan Riau tercatat sebanyak 160 orang. Jurnalis yang tergabung ke organisasi AJI sebanyak 48 (AJI Kota Tanjungpinang dan AJI kota Batam). Sementara sebagian lain tergabung dalam organisasi IJTI dan berbagai organisasi lainnya.

Pelatihan pemeriksaan bagi jurnalis sejauh ini belum massif dilakukan seperti kota lain di Indonesia. Di Kota Tanjungpinang pelatihan terbaru dilakukan pada tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 23 November hingga 24 November dengan menghadirkan *trainer* Nurfaumi Budiarto (purwoko, n.d.). Sementara di Kota Batam pelatihan terbaru dilakukan pada 4 sampai 5 Juni 2022 dengan Yogi Eka Sahputra dan Rini Yustiningsih sebagai *trainer*. Selain diikuti oleh jurnalis media massa, kegiatan tersebut juga diikuti oleh jurnalis mahasiswa (GenPi.co, 2022).

Dua kegiatan di atas dapat dikatakan belum mampu mengakomodasi seluruh jurnalis di Kepulauan Riau. Rata-rata setiap pelatihan tidak lebih dari 30 orang peserta. Penetapan standar ini bertujuan untuk keefektifan proses pelatihan. Dengan jumlah peserta yang terbatas diharapkan pelatihan dapat berjalan maksimal, sebab sebagian materinya adalah praktik pemeriksaan fakta yang dipandu langsung oleh *trainer*.

Lebih lanjut, workshop pemeriksaan fakta yang pengabdian lakukan melibatkan sebanyak 20 orang peserta dan dua orang *trainer*. Peserta terdiri dari 10 orang jurnalis profesional dari media lokal dan nasional yang bertugas untuk Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri. Sementara 10 orang lainnya adalah jurnalis mahasiswa (persma) dari sejumlah perguruan tinggi di Kepulauan Riau.



Alasan pelibatan jurnalis mahasiswa merujuk pada judul pengabdian yang mengakomodasi keberadaan jurnalis muda. Jika jurnalis profesional bekerja dalam skala pengumpulan dan penyebarluasan informasi dalam skala yang lebih luas. Sementara jurnalis mahasiswa adalah ujung tombak dalam penyebarluasan informasi dalam skala kampus. Sekalipun demikian, mengingat mis-disinformasi tidak tidak mengenal batasan ruang dan waktu, maka keterlibatan jurnalis mahasiswa tidak kalah penting untuk mendapat pembekalan terkait pemeriksaan fakta.



*Gambar 2.* Pelatihan Cek Fakta untuk Jurnalis Kepulauan Riau

Sebelum memulai pelatihan, pengabdian memberikan sejumlah pertanyaan kepada peserta terkait literasi digital dan gangguan informasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan fenomena yang lazim ditemui oleh jurnalis ketika bekerja di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman para jurnalis terkait literasi digital dan gangguan informasi.

Peserta pelatihan cek fakta pada kegiatan ini mayoritas sudah mengenali apa yang dimaksud dengan mis dan disinformasi. Sekalipun demikian, tetap ada peserta yang tidak mengetahui. Selain itu juga ada peserta yang masih ragu antara mengetahui dan tidak. Pada pertanyaan apakah peserta pernah menyebarkan hoaks, mayoritas di antara mereka menyatakan tidak pernah. Sekalipun demikian, pada bagian ini sebanyak 31 persen ada yang menjawab mungkin, dengan artian antara pernah atau tidak.

Lebih lanjut, pada pertanyaan terkait pernah atau tidak melakukan verifikasi informasi, 87 persen dari seluruh responden menjawab pernah dan sisanya menjawab mungkin. Sementara terkait seberapa sering melakukan verifikasi informasi, 62,5 persen menjawab sudah dan sisanya menjawab jarang.

Jawaban mungkin terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas diduga karena ada responden yang belum mengenali apa itu mis-disinformasi dan hoaks. Berbagai mis-disinformasi yang berlalulalang di media digital, terutama pada platform media sosial kerap kali dibuat begitu nyata, sehingga dapat menjebak masyarakat yang kurang teliti menyerap informasi tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keraguan pada para responden untuk menjawab, sehingga memilih untuk menjawab pilihan 'mungkin'.

Media mainstream, baik itu cetak maupun daring masih menjadi pilihan tertinggi dari responden dalam hal memperoleh informasi terpercaya (33,3 persen). Berikutnya media sosial berada pada urutan kedua dengan angka 25 persen. Pada urutan selanjutnya adalah radio dengan angka 18,8 persen, televisi dan website pemerintah pada angka yang sama yaitu 12,5 persen. Saat dikerucutkan ke media sosial, platform Instagram berada pada posisi pertama sebagai sumber informasi terpercaya, dilanjutkan dengan twitter dan facebook, berikutnya whatsapp, youtube dan terakhir telegram.

Pada pertanyaan respon responden terhadap adanya hoaks, rata-rata menjawab akan melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Sejumlah jawaban menyebutkan akan menguji dan memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Selain itu juga ada yang menjawab akan memastikan informasi itu ke sumber aslinya.

Berdasarkan hasil tes di awal terlihat bahwa pada dasarnya jurnalis muda di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjungpinang sudah mengenali mis-disinformasi. Bahkan sebagian besar dari peserta menyatakan sudah melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh. Terkait intensitas melakukan

verifikasi, sebagian besar juga menyatakan cukup sering melakukan hal tersebut. Selain itu, untuk memperoleh informasi peserta juga mayoritas memilih media mainstream, baik media cetak maupun daring. Sebagian lainnya ada yang memilih media sosial, walaupun tidak semua informasi di media sosial dapat dicurigai sebagai hoaks, tetap ada sejumlah konten yang dibuat oleh akun *official* media mainstream dengan standar jurnalistik. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa pada dasarnya jurnalis di Tanjungpinang sudah memiliki literasi digital yang cukup baik.

Sekalipun demikian, pengetahuan para peserta masih bersifat umum. Belum spesifik terhadap penyebab, pola penyebaran dan pola produksi hoaks. Selain itu, para peserta juga belum memahami *tools* secara maksimal yang dapat digunakan sebagai alat menverifikasi informasi.

Oleh karenanya, pelatihan tersebut mengambil tema “Anatomi hoaks: kategori, alasan, modus, dampak dan cara verifikasi”. Tema itu kemudian diturunkan pada 7 materi, dimulai dari pengguna internet dan literasi digital di Indonesia, Hoaks momentum dan evergreen, dan kenapa orang mudah percaya hoaks. Selanjutnya adalah modus hoaks yang paling lazim, 7 kategori hoaks, 7 alasan hoaks dan terakhir 5 pilar verifikasi.

### Kesimpulan

Perkembangan media digital menuntut peningkatan kualitas literasi masyarakat. Hoaks atau informasi salah adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini tentu saja tidak dapat dihentikan, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan untuk membatasi informasi yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri.

Selain itu, jurnalis sebagai ujung tombak penyebaran informasi juga perlu meningkatkan kapasitas terkait literasi digital. *Information disorder* bahkan pernah menggiring wartawan untuk berbondong-bondong membuat pemberitaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap orang dapat terjebak oleh mis-disinformasi. Oleh karenanya, peningkatan kemampuan jurnalis dalam hal mengenali dan menverifikasi informasi sangat dibutuhkan.

### Saran

Kegiatan workshop pemeriksaan fakta ini hendaknya tidak menjadi kegiatan terakhir di Tanjungpinang atau Kepulauan Riau secara umum. Mengingat jumlah jurnalis yang sudah mengikuti pelatihan pemeriksaan fakta baru sedikit, maka hal yang sama perlu dilakukan dengan melibatkan jurnalis lainnya. Penguatan literasi digital juga dapat dilakukan oleh banyak pihak, perguruan tinggi maupun organisasi independen lainnya.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Kepri dan Aliansi Jurnalis Independen Tanjungpinang atas bantuan moril dan materil dalam pelaksanaan pengabdian ini.

### Referensi

Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

- Afandi, A., Sucipto, M. H., & Muhid, A. (2016). *Modul participatory action research (PAR) untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Aliansi Jurnalis Independen*. (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from <https://aji.or.id/>
- Amazeen, M. A. (2020). Journalistic interventions: The structural factors affecting the global emergence of fact-checking. *Journalism*, 21(1), 95–111. <https://doi.org/10.1177/1464884917730217>
- Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet—Nasional Tempo.co*. (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>
- detikcom, T. (n.d.). *Menteri Tjahjo Minta Maaf Sempat Unggah Foto Hoax Tol Cisumdawu*. detiknews. Retrieved August 16, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-5761150/menteri-tjahjo-minta-maaf-semapat-unggah-foto-hoax-tol-cisumdawu>
- Dewan Pers*. (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from <https://dewanpers.or.id/>
- GenPi.co. (2022, June 6). *AJI Batam dan Google News Initiative Gelar Pelatihan Cek Fakta*. GenPI.co. <https://kepri.genpi.co/kepri-terkini/1704/aji-batam-dan-google-news-initiative-gelar-pelatihan-cek-fakta>
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Pub.
- Jurnalisme, “berita palsu”, & disinformasi: Buku pegangan untuk pendidikan dan pelatihan jurnalisme—UNESCO Digital Library* (E. Wendratama, Trans.). (2019). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368022>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika*. (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from [https://m.kominfo.go.id/content/detail/14853/kominfo-sebut-ada-43000-media-massa-yang-tidak-memenuhi-persyaratan-peraturan-perundangan/0/sorotan\\_media](https://m.kominfo.go.id/content/detail/14853/kominfo-sebut-ada-43000-media-massa-yang-tidak-memenuhi-persyaratan-peraturan-perundangan/0/sorotan_media)
- Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. *Media, Culture & Society*, 33(2), 211–221.
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory* (Vol. 1–2). <https://doi.org/10.4135/9781412959384>
- Mardjianto, FX. L. D., Wedhaswary, I. D., Monggilo, Z. M. Z., Unggraini, I. N., & Budiarto, M. N. (2022). *Modul Literasi Digital untuk Perguruan Tinggi*. Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/read/buku/94/modul-literasi-digital-untuk-perguruan-tinggi.html>
- Muliawanti, L. (2018). *Jurnalisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisme dan Profesionalitas Jurnalisme Online*. LENTERA.
- Periksa Fakta Melawan Infodemi*. (n.d.). Aliansi Jurnalis Independen. Retrieved September 14, 2022, from <https://aji.or.id/read/buku/76/periksa-fakta-melawan-infodemi.html>
- purwoko. (n.d.). *AJI Indonesia Gelar Latihan Cek Fakta kepada Puluhan Jurnalis Tanjungpinang | Surya Kepri*. Retrieved September 14, 2022, from <https://suryakepri.com/2019/11/23/aji-indonesia-gelar-latihan-cek-fakta-kepada-puluhan-jurnalis-tanjungpinang/>
- PWI - Persatuan Wartawan Indonesia*. (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from <https://www.pwi.or.id/>
- Rahmat, S. (2022). *Gangguan Informasi, Cek Fakta & Literasi Digital*. Sulus Pustaka.
- Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380>
- UNESCO. (2004). *The Plurality of literacy and its implications for policies and programmes: Position paper—UNESCO Digital Library*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136246>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe Publishing. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>
- Yudhapramesti, P. (2015). Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 89–98.